



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 14 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 137 TAHUN 2017  
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA DINASLINGKINGAN HIDUP KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 137 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 137 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 660);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK.**

**Pasal I**

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 137 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 137 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 13 Januari 2021**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 13 Januari 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650205 198903 1 022

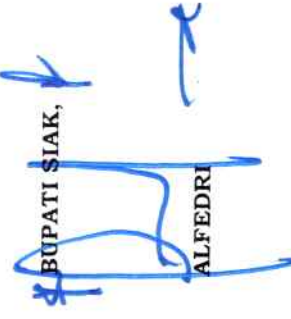
PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bg-organises	Kabag	[Signature]
2	Bg HUKUM	Kasub	[Signature]
3	SEK DA	ASST III	[Signature]
4			
5			

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Kepala Dinas		1					
a. Sekretaris			1				
1) Kasubbag Perencanaan				1			
1) Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan					1		
2) Pengelola Program dan Kegiatan					1		
3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan					2		
2) Kasubbag Keuangan				1			
1) Bendahara					1		
2) Pengelola gaji					1		
3) Pengadministrasian Keuangan					3		
4) Penyusun Laporan Keuangan					2		
5) Verifikasi Data Laporan Keuangan					2		
3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian				1			
1) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah					2		
2) Pengadministrasian Kepegawaian					1		
3) Pengadministrasi Umum					3		
4) Analisis Tata Usaha					2		
5) Analisis Aset Daerah					2		
b. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH			1				
1) Kasi Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan				1			
1) Analisis Lingkungan Hidup					1		
2) Pengelola Lingkungan					2		
3) Pengadministrasi Perizinan					2		
4) JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama						2	
5) JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda						2	
6) JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya						1	
2) Kasi Penataan, Peningkatan Kapasitas LH				1			
1) Penelaah Dampak Lingkungan					1		
2) Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim					1		
3) Penyuluh Lingkungan Hidup					2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>2</p> <p>4) Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup 5) JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 6) JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 7) JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya</p> <p><b>c. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>  <b>1) Kasi Kebersihan, Pengurangan dan Penanganan Sampah</b>  1) Penyuluh Lingkungan Hidup  2) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan  3) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir  4) Pengelola Penataan Sampah</p> <p><b>2) Kasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>  1) Analisis Lingkungan Hidup  2) Penyuluh Lingkungan Hidup</p> <p><b>d. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  <b>1) Kasi Pengawas dan Pemantauan Lingkungan</b>  1) Analisis Lingkungan Hidup  2) Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup  3) JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama  4) JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda  5) JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya</p> <p><b>2) Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>  1) Analisis Lingkungan Hidup  2) JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama</p>		1	1	2	2 2 1	
	<p><b>Jumlah</b></p> <p><b>Jumlah Total</b></p>	1	4	9	46	17	77

PARAF KOORDINASI				
No	Peringkat Daerah	Jabatan	Paraf	
1	Ag. Organisasi	Kabag	Z	
2	Bag. Hukum	Kotab	Z	
3	SEK. RETRANSPOR			
4				
5				

BUPATI SIAK,  
  
ALFEDRI